

SOSIALISASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD
PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

Dalam upaya mewujudkan manajemen keuangan pemerintah yang baik, diperlukan transparansi, akuntabilitas dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah, sebagaimana amanat pasal 4 dan pasal 103 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Berikut ini disampaikan mengenai Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat direncanakan sebesar Rp.2.593.479.200,00 dan mengalami perubahan target dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 sebelumnya sebesar Rp.2.104.832.040.777,08

Sumber-sumber pendapatan dan Jenis Penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Perubahan APBD Tahun 2019 direncanakan sebesar Rp.335.736.194.692,00 dan mengalami penurunan dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.34.373.781.049,08 sehingga rincian PAD terdiri dari :

- a. Pajak Daerah sebesar Rp.291.791.593.553,00;
- b. Retribusi Daerah sebesar Rp.20.294.000.000,00;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp.9.215.164.239,00;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp.14.435.436.900,00;

2. Dana Perimbangan

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp.1.704.521.284.508,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp.19.554.644.000,00;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.064.728.000,00;
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.117.379.545.508,00;
- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.407.434.206.000,00;
- e. Dana Insentif Daerah sebesar Rp.36.084.161.000,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Rencana pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.1.336.000.000,00.

II. BELANJA DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan melihat kemampuan Pendapatan Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Berdasarkan Kebijakan Belanja Daerah, maka Prioritas Plafond Anggaran Belanja Daerah dirumuskan untuk penajaman program dan kegiatan yang dituangkan dalam program prioritas provinsi Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Perbaikan infrastruktur dan konektivitas;
- b. Perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih;
- d. Peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- e. pengelolaan lingkungan hidup.

Kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran dilakukan perubahan akibat perkembangan yang tidak sesuai kebijakan umum anggaran, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, asumsi saldo anggaran lebih tahun sebelumnya tidak tercapai dan harus disesuaikan dengan tahun berjalan. Memperhatikan belanja yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 ini, termasuk belanja pegawai dan hibah serta asumsi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (silpa) tahun 2018 tidak terpenuhi, maka perlu dilakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. Melalui kebijakan umum perubahan anggaran ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan perbaikan-perbaikan terhadap keseluruhan pelaksanaan anggaran agar lebih baik serta mempertajam sasaran dan target capaian program dan kegiatan, disamping itu untuk meningkatkan kinerja masing-masing satuan kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terhadap capaian sasaran RPJMD 2017-2022.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 direncanakan sebesar Rp.2.110.182.588.654,89 atau bertambah sebesar Rp.33.460.623.724,38 dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.2.076.721.964.930,51 yang terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung

Direncanakan sebesar Rp.1.087.780.664.060,26 meningkat sebesar Rp.28.645.410.272,50 atau 2,63% dari APBD Pokok Tahun 2019 sebesar Rp.1.059.135.253.787,76.

Penganggaran Belanja Tidak Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Rencana Belanja Pegawai sejumlah Rp.533.472.448.250,79 menurun sebesar Rp.17.013.835.505,20 atau 3,19% dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.550.486.283.755,99. Belanja Pegawai dialokasikan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan, Belanja Operasional Penunjang Kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Belanja Operasional Penunjang Pimpinan DPRD, Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2017 serta biaya pemungutan pajak daerah.

b. Belanja Bunga

Rencana Belanja Bunga sebesar Rp.19.154.077.367,97 tidak mengalami perubahan dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 yang diperuntukkan membayar bunga pinjaman dana dari PT.SMI untuk Pembangunan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Barat Tipe B.

c. Belanja Hibah

Rencana Belanja Hibah sebesar Rp.310.141.095.431,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.47.390.177.431,00 atau 15,28% dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.262.750.918.000,00 yang diperuntukkan bagi Bantuan Keuangan Sekolah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk menunjang peningkatan pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sifatnya tidak mengikat dan tidak wajib.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial ditargetkan dalam Perubahan APBD Tahun 2019 sebesar Rp.1.149.648.197,00 mengalami peningkatan dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya tidak dianggarkan, belanja bantuan sosial tersebut diperuntukkan untuk pembayaran BPJS Kesehatan pada Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

e. Belanja Bagi Hasil

Alokasi Belanja Bagi Hasil pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.148.559.394.413,50 mengalami penurunan sebesar Rp.1.380.579.850,30 dari target dalam APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.149.939.974.663,80 diarahkan untuk bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi pada tahun anggaran 2019 yang menjadi hak pemerintah kabupaten sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten dan Partai Politik

Alokasi belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten dan Partai Politik dianggarkan sebesar Rp.73.804.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.000.000.000,00 atau 1,35% dari APBD Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.72.804.000.000,00, digunakan dalam rangka peningkatan

akselerasi percepatan pembangunan kabupaten, sedangkan bantuan keuangan kepada partai politik digunakan dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik dan penguatan kelembagaan serta peningkatan peran dan fungsi partai politik;

g. Belanja Tidak Terduga

Rencana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp.1.500.000.000,00 berkurang Rp.2.500.000.000,00 dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.4.000.000.000,00 di anggarakan untuk belanja kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, kegiatan tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2. Belanja Langsung

Direncanakan sebesar Rp.1.022.401.924.594,63 bertambah sebesar Rp.4.815.213.451,88 atau 0,47% dari APBD Pokok Tahun Anggaran 2019 yang dianggarkan sebesar Rp.1.017.586.711.142,75.

III. PEMBIAYAAN DAERAH

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Perubahan 2019 mengalami defisit belanja sebesar Rp.68.589.109.454,89. Defisit APBD tersebut sebagai akibat belanja lebih besar dari pada pendapatan. Untuk menutupi defisit Belanja dimaksud, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.68.589.109.454,89 yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dari sisa Lebih Perhtiuangan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp.129.349.557.854,89 dan merencanakan pengeluaran pembiayaan melalui penyertaan modal pemerintah daerah kepada PT.Bank Sulselbar sebesar Rp.12.000.000.000,00 dan Perumda PT. Sebuku Energi Malaqbi sebesar Rp.2.000.000.000,00 serta pengeluaran pembiayaan pada pembayaran pokok utang kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp.46.760.448.400,00 sehingga permasalahan pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dapat bersaldo nihil atau nol.

Demikian disampaikan Rancangan Perubahan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2018 kepada masyarakat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Mamuju, 28 Agustus 2019



SEKRETARIS DAERAH

SELAKU KETUA TAPD PROVINSI SULAWESI BARAT,

DR. MUHAMMAD IDRIS, M.Si

Pangkat : Pembina Utama / IV.e

NIP. : 19641115 199303 1 001

RANPERDA PERUBAHAN APBD TA. 2019

STRUKTUR RANCANGAN PERUBAHAN APBD TA. 2019

NO	URAIAN	RANCANGAN PERUBAHAN TAHUN 2019		SELISIH (TAMBAH/KURANG)	%
		APBD POKOK	HASIL KESEPAKATAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4-3)	(6)
I	PENDAPATAN DAERAH	2.104.832.040.777,08	2.041.593.479.200,00	-63.238.561.577,08	-0,31
1,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	370.109.975.741,08	335.736.194.692,00	-34.373.781.049,08	-10,24
	Pajak Daerah	295.359.859.050,00	291.791.593.553,00	-3.568.265.497,00	-1,22
	Retribusi Daerah	44.937.600.000,00	20.294.000.000,00	-24.643.600.000,00	-121,43
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	16.175.000.000,00	9.215.164.239,00	-6.959.835.761,00	-75,53
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	13.637.516.691,08	14.435.436.900,00	797.920.208,92	5,53
1,2	DANA PERIMBANGAN	1.732.910.635.000,00	1.704.521.284.508,00	-28.389.350.492,00	-1,67
	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	19.554.644.000,00	19.554.644.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Umum	1.064.068.728.000,00	1.064.068.728.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Fisik	205.768.896.000,00	177.379.545.508,00	-28.389.350.492,00	-16,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	407.434.206.000,00	407.434.206.000,00	0,00	0,00
	Dana Insentif Daerah	36.084.161.000,00	36.084.161.000,00	0,00	0,00
1,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.811.430.036,00	1.336.000.000,00	-475.430.036,00	-35,59
	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam negeri	1.811.430.036,00	336.000.000,00	-1.475.430.036,00	-439,12
	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
2	BELANJA DAERAH	2.076.721.964.930,51	2.110.182.588.654,89	33.460.623.724,38	1,59
2,1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.059.135.253.787,76	1.087.780.664.060,26	28.645.410.272,50	2,63
	Belanja Pegawai	550.486.283.755,99	533.472.448.250,79	-17.013.835.505,20	-3,19
	Belanja Bunga	19.154.077.367,97	19.154.077.367,97	0,00	0,00
	Belanja Hibah	262.750.918.000,00	310.141.095.431,00	47.390.177.431,00	15,28
	Belanja Bantuan Sosial	-	1.149.648.197,00	1.149.648.197,00	100,00
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi dan Kabupaten	149.939.974.663,80	148.559.394.813,50	-1.380.579.850,30	-0,93
	Belanja Bantuan Keuangan + Partai Politik	72.804.000.000,00	73.804.000.000,00	1.000.000.000,00	1,35
	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	1.500.000.000,00	-2.500.000.000,00	-166,67
2,2	BELANJA LANGSUNG	1.017.586.711.142,75	1.022.401.924.594,63	4.815.213.451,88	0,47
	Belanja Pegawai	61.882.337.000,00	60.802.337.000,00	-1.080.000.000,00	-1,78
	Belanja Barang dan Jasa	538.271.309.365,01	525.687.116.408,89	-12.584.192.956,12	-2,39
	Belanja Modal	417.433.064.777,74	435.912.471.185,74	18.479.406.408,00	4,24
	Defisit / Surplus (Rp)	28.110.075.846,57	-68.589.109.454,89	-96.699.185.301,46	140,98
3	PEMBIAYAAN DAERAH	-28.110.075.846,57	68.589.109.454,89	96.699.185.301,46	140,98
3,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	30.650.372.553,43	129.349.557.854,89	98.699.185.301,46	76,30
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	30.650.372.553,43	129.349.557.854,89	98.699.185.301,46	76,30
	- Asumsi awal SILPA DAU 2018, dianggarkan pada APBD 2019	18.696.152.484,43	18.696.152.484,43	0,00	0,00
	- SISA DAU 2018		57.486.633.097,66	57.486.633.097,66	100,00
	- Asumsi awal SILPA DAK (2010-2017), dianggarkan pada APBD 2019	11.954.220.069,00	11.954.220.069,00	0,00	0,00
	- Sisa DAK Fisik 2010-2017		18.479.406.408,00	18.479.406.408,00	100,00
	- Sisa DAK Fisik 2018		9.272.518.429,00	9.272.518.429,00	100,00
	- Dana BOS		7.390.167.431,00	7.390.167.431,00	100,00
	- Dana BOS direkening Bendahara		336.847.947,80	336.847.947,80	100,00
	- Tunjangan Profesi Guru		2.071.929.410,00	2.071.929.410,00	100,00
	- Tambahan Penghasilan Guru		1.188.000.000,00	1.188.000.000,00	100,00
	- Tunjangan Khusus Guru		685.486.800,00	685.486.800,00	100,00
	- Dana Kapitasi JKN		156.153.112,00	156.153.112,00	100,00
	- Bantuan Operasional Kesehatan		251.035.550,00	251.035.550,00	100,00
	- Dana Peningkatan Kapitasi Koperasi UKM		70.301.240,00	70.301.240,00	100,00
	- Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan		42.369.212,00	42.369.212,00	100,00
	- Dana Hibah Monev Rehb dan Rekon Bencana		500.000.000,00	500.000.000,00	100,00
	- DID		768.336.664,00	768.336.664,00	100,00
	Pinjaman dari lembaga bukan bank	0,00	0,00	0,00	0,00
3,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	58.760.448.400,00	60.760.448.400,00	2.000.000.000,00	3,29
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	12.000.000.000,00	14.000.000.000,00	2.000.000.000,00	14,29
	Pembayaran Pokok Utang kepada Lembaga Bukan Bank	46.760.448.400,00	46.760.448.400,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO (Rp)	-28.110.075.846,57	68.589.109.454,89	96.699.185.301,46	140,98
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00